

## LARANGAN MUDIK LEBARAN 2021

# Pengusaha dan Awak Angkutan Kian Terpuruk

NASIB pengusaha transportasi darat maupun awak angkutan kian terpuruk dengan diberlakukannya larangan mudik Lebaran 2021. Kebijakan tersebut dinilai semakin memperburuk dan memperparah kondisi bisnis transportasi darat yang juga terdampak pandemi Covid-19 sejak 2020 lalu.

Kebijakan larangan mudik Lebaran tahun sebelumnya membuat pengusaha transportasi darat maupun awak angkutan terpuruk. Sementara Lebaran tahun ini yang semula diharapkan menjadi musim panen ternyata gagal panen. Terlebih larangan mudik yang diberlakukan guna mencegah kenaikan kasus Covid-19 ini tidak dibarengi solusi berupa stimulus maupun insentif bagi sektor angkutan publik itu.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Organisasi Angkutan Darat (Organda) DIY V Hantoro menilai, pelaksanaan kebijakan larangan mudik ini harus dibarengi pengawasan dan kontrol. Sebab dipastikan muncul angkutan liar atau pergerakan mobilitas masyarakat dari kota besar menuju kampung halamannya. Pengawasan dimaksudkan agar pengusaha angkutan darat tidak menjadi kambing hitam menimbulkan klaster baru Covid-19.

"Kita harus adil, apabila angkutan darat sudah berhenti beroperasi mematuhi larangan mudik, maka seharusnya ada stimulus. Kami juga sepakat mengandangkan hampir semua armada, sehingga jangan sampai dikambinghitamkan jika ada peningkatan kasus penularan virus Korona. Masyarakat sudah banyak yang mudik duluan saat ini, tapi menggunakan angkutan apa kami tidak tahu," paparnya.

Hantoro menegaskan, Organda mendukung dan menyesuaikan kebijakan



Terminal Giwangan terlihat lengang dengan diberlakukannya larangan mudik Lebaran.

larangan mudik. Diharapkan pemerintah konsekuen melakukan kontrol maupun pengawasan, sehingga mobilitas masyarakat bisa dikurangi selama mudik Lebaran. Sebab, sekarang ini angkutan umum sudah mulai tergusur dengan maraknya angkutan pribadi yang justru ada pengawasan maupun kontrol.

Dikatakan, pihaknya sudah menyiapkan armada yang mengantongi protokol kesehatan Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment (Ramah lingkungan) atau CHSE antara lain 819 bus pariwisata, 250 bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), 108 bus Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) ditambah 1000-an taksi di DIY, tapi pada akhirnya tidak bisa bergerak dengan munculnya larangan mudik Lebaran.

"Kami berharap pemerintah benar-benar melakukan kontrol mobilitas masyarakat selama larangan mudik Lebaran. Kalaupun kami sudah menyiapkan kendaraan maupun awak angkutannya dan

mengeluarkan biaya yang tidak sedikit ternyata mudik dibatalkan, maka itu menjadi tanggung jawab kami," jelasnya

Pemilik PO GeGe Transport tersebut menyampaikan, agar sektor angkutan darat tidak semakin terpuruk dengan kebijakan larangan mudik, Organda DIY berharap ada solusi maupun insentif. Pihaknya pada prinsipnya tidak menolak kebijakan larangan mudik, tapi harus ada pengawasan agar kasus Covid-19 tidak bertambah, terutama di DIY.

"Kami terima kebijakan larangan mudik tapi tetap harus ada solusi. Kami juga telah beradaptasi dengan keadaan pandemi sejak tahun lalu. Untuk itu, saya berharap pemerintah merespons melalui solusi dan fasilitas dari pemerintah sekaligus mediasi berupa program relaksasi seperti menghilangkan pajak kendaraan bermotor bagi kendaraan berplat kuning yang mempunyai izin trayek sebagai stimulus selama pandemi," tutur Hantoro.

Selain itu, Hantoro menyatakan agar masyarakat tidak takut menggunakan

angkutan umum supaya moda transportasi bisa bergerak, mengingat rerata tingkat keterisian penumpang atau *load factor* angkutan darat sudah 0 persen, sehingga awak angkutan yang setidaknya mencapai 5.500 orang maupun pengusaha angkutan darat sama-sama sakit saat ini. Organda DIY juga proaktif melakukan inovasi dan memberikan pelayanan terbaik, sehingga pemerintah diharapkan bisa memberikan ruang gerak melakukan kegiatan sesuai dengan protokol kesehatan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan sudah berkoordinasi dengan Organda DIY sebelum kebijakan larangan mudik diberlakukan. Organda DIY sudah mengajukan permohonan keringanan terkait pajak kendaraan bagi pengusaha angkutan dan bantuan langsung tunai (BLT) bagi awak angkutan. Sayangnya permintaan tersebut tidak bisa diputuskan pihaknya karena menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"Kami sudah

berkomunikasi dengan Organda yang mengusulkan keringanan dan BLT sejak tahun lalu, termasuk berkonsultasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) DIY. Tapi kami tidak bisa mengambil keputusan sepihak, semuanya ada di pusat. Setidaknya kami sudah mendata awak angkutan umum di DIY agar mendapatkan BLT, meskipun belum terealisasi hingga saat ini," paparnya.

Made menegaskan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak dengan diberlakukannya kebijakan larangan mudik ini. Padahal momentum mudik menjadi angin segar untuk meningkatkan pendapatan pelaku bisnis transportasi melalui program mudik gratis yang didukung angkutan publik setiap tahunnya. Bisnis transportasi, terutama angkutan umum darat, sangat terdampak dan terpukul sejak pandemi Covid-19, ditambah adanya larangan mudik Lebaran.

"Kami prihatin nasib angkutan umum di DIY saat ini, apalagi DIY adalah salah satu tujuan mudik sekaligus pariwisata yang sangat menarik. Belum lagi animo masyarakat menggunakan angkutan umum masih kurang dan belum berani. Padahal kami telah mengimbau agar masyarakat DIY beralih menggunakan moda transportasi," tandasnya.

Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY ini juga menyatakan, pengusaha angkutan darat yang tergabung dalam Organda DIY agar bisa menjalankan bisnisnya sesuai protokol kesehatan dan mengantongi sertifikat CHSE. Upaya ini akan lebih meyakinkan masyarakat untuk menggunakan angkutan publik yang aman dan nyaman dengan adanya

sertifikasi tersebut.

"Saya melakukan monitoring di beberapa terminal masih ada bus besar maupun bus kecil atau AKDP yang beroperasi, meskipun minim penumpang pada awal diberlakukannya kebijakan larangan mudik. Angkutan umum yang boleh beroperasi adalah yang ditempel stiker dari Kementerian Perhubungan (Kemhub). Karena memang disediakan angkutan umum untuk mengakomodir masyarakat yang tujuannya tidak mudik seperti menggunakan bus perkotaan, taksi dan sebagainya," imbuh Made.

Menurutnya, pemerintah seharusnya memberikan stimulus atau insentif bagi sektor angkutan publik ketika membuat kebijakan larangan mudik Lebaran. Kereta api jarak jauh pun masih disediakan dan disupport pemerintah. Sedangkan angkutan umum darat sangat tergantung dari masyarakat.

Pihaknya sangat berharap adanya stimulus maupun relaksasi bagi awak angkutan maupun pengusaha angkutan seperti keringanan pajak dan sebagainya. Dishub DIY tidak bisa memutuskan sepihak, sehingga berharap ada keberpihakan pemerintah pusat terhadap sektor transportasi publik supaya tidak gulung tikar.

"Cukup dilematis dan serba salah karena kebijakan ini pada dasarnya bertujuan menekan penularan virus Korona agar tidak semakin meluas, tapi dari sisi ekonominya jangan sampai tertekan," pungkas Made. (Fira Nurfitriani)

## KANDHA RAHARJA

## KARANGANYAR JADI PERCONTOHAN

# Tanam Porang Lebih Menjanjikan

BUDI daya tanaman oleh petani Dusun Nglundo, Desa/Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar beralih ke umbi porang. Hasilnya lebih menguntungkan dibanding menanam jahe dan ketela yang selama ini diandalkan menopang perekonomian masyarakat setempat.

Seorang petani muda Ngargoyoso, Warsito Dwi Pratama memulai tanam di lahan satu hektare pada dua tahun lalu. Modalnya satu kilogram benih porang yang dikenal dengan nama katak. Dengan mempelajari budi daya dan prospeknya di YouTube, ia menanti panen dengan sabar.

"Perawatannya sederhana. Cukup diberi pupuk kompos sebulan sekali kalau sering hujan. Ditanam di bawah naungan pohon sengon. Kalau tanamnya dari katak, panennya butuh waktu dua musim atau setahun. Namun kalau menanamnya dari umbi,

bisa dipanen satu musim kemudian atau setengah tahun," kata Warsito.

Panen perdana menghasilkan tiga kuintal umbi. Selain itu, katak yang tumbuh di sela batang dipakai lagi untuk modal tanam selanjutnya serta bisa dijual lagi.

"Perkilogram porang Rp 9 ribu. Sedangkan katak perkilogram Rp 220 ribu," katanya.

Dibandingkan bercocok tanam jahe atau ketela, hasilnya tak sebagai umbi porang. Warsito mantap beralih ke umbi porang karena keuntungan lumayan bakal terus diterimanya.

Indonesia merupakan penghasil porang berkualitas, terutama di Pulau Jawa. Tanaman umbi bernama latin *Amorphophallus muelleri* Bl ini sedang gencar diekspor ke China dan Jepang. Negara manca mengandalkan daerah penghasilnya di Indonesia,



Umbi porang dan ladang budidayanya di Karanganyar.

terutama di Pulau Jawa. Olahannya dipakai bahan kosmetik, farmasi hingga sumber karbohidrat makanan pokok

rendah lemak dan kalori.

Warsito sudah memiliki pengepul tetap umbi porang dari pabrik di Jawa Timur. Pabrik itu mengolahnya ke bahan setengah jadi kemudian diekspor.

Melihat kesuksesannya, petani di sekitarnya ramai-ramai menanam porang. Saat ini, mereka membentuk komunitas petani porang Ngargoyoso. Jumlah petani sekarang 105 orang atau sekitar 85 persen petani di dusunnya menanam umbi tersebut. Dengan adanya komunitas ini, petani lebih mudah mendapatkan benih dan mitra penjualan hasil panen. Petani juga memiliki proteksi jika harga jual jatuh. Dengan mitranya, petani porang Ngargoyoso melalui komunitas berhasil membuat kontrak.

Seorang petani lainnya, Ismanto Bagong mengaku labanya menanam porang dari hasil penjualan umbi dan benih Rp 480 juta. Sedangkan modalnya hanya Rp105 juta.

"Saya mengawalinya dari coba-coba. Modal Rp 1 juta hasilnya Rp 4,8 juta. Lalu berkembang sampai sekarang. Jangan ragu menanam porang. Keuntungannya berlipat. Apalagi ini tanam ekspor. Di dusun ini ada 18 hektare ditanami porang," kata pria yang menjabat ketua komunitas petani porang Ngargoyoso ini.

Kalangan investor pun tertarik membudidayakan. Di antaranya Disa Ageng Alifven, tokoh pengusaha muda Karanganyar. Melihat agrobisnis ini berprospek, ia menjalin kerja sama sewa lahan dengan PTPN IX (Persero).

"Tanam porang di lahan 5,4 hektare dekat waduk Gondang dengan buruh warga sekitar. Petani harus *out of the box*. Cari yang paling menguntungkan. Harapannya menjadikan Karanganyar penghasil utama porang dan jadi percontohan," katanya.

(Abdul Alim)



Umbi porang

KR-Abdul Alim